



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IRMA FITRIA
2. Jabatan : KOORDINATOR PRODI STATISTIKA
3. NHK : 801941

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 300.000.000

1. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 165 m2/81 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 148.000.000

1. MOBIL, HONDA MOBILIO DD4 1.5 RS M-CVT Tahun 2017, HADIAH Rp. 130.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOTOR, YAMAHA 50C (T135HC) MT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 18.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 93.966.403**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

Sub Total Rp. 559.966.403

III. HUTANG Rp. 236.600.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 323.366.403

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.